



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 872/VII/2015

III/JULI 2015



Ketua DPR Lepas Pemudik di Tanjung Priok



Ketua DPR Lepas Pemudik di Tanjung Priok



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon berdialog dengan pemudik

Sekitar 8.500 orang membanjiri Terminal Bus Tanjung Priok. Mereka bersiap pulang kampung lewat program mudik gratis yang difasilitasi PT. Pelindo II. Ketua DPR RI Setya Novanto melepas para pemudik dengan harapan mereka bisa berkumpul dengan sanak famili dalam keadaan sehat dan bahagia.

“Ini penyelenggaraan yang perlu diapresiasi bagi pemerintah lewat Pelindo, karena telah menggelar mudik gratis dengan pelayanan yang sangat baik,” kata Novanto Rabu pagi (15/7). Di halaman terminal terparkir 150 bus dengan tujuan kota-kota di Pulau Jawa. Para pemudik, ujar Novanto, dibekali

pula dengan asuransi dan obat-obatan untuk keamanan selama di perjalanan.

“DPR berterima kasih atas penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan bisa pulang kampung dengan selamat dan kembali ke Jakarta juga dengan selamat,” ucapnya lebih lanjut. Novanto juga menyempatkan diri menemui para pemudik, seraya menyampaikan salam bagi keluarga para pemudik.

Program mudik gratis ini, lanjut Novanto harus menjadi contoh bagi BUMN-BUMN lainnya, agar bisa selalu membantu masyarakat. Sementara itu, Dirut PT. Pelindo II RJ. Lino yang mendampingi Novanto, mengatakan, program mudik gratis ini dilakukan

hampir setiap tahun. Lino berharap, tahun depan, masyarakat yang ikut program ini bisa lebih banyak lagi.

Peserta mudik gratis ini terdiri dari para pegawai Pelindo termasuk anak perusahaannya. Masyarakat umum juga tak ketinggalan ikut serta dalam rombongan mudik tersebut. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar yang selama bertahun-tahun bekerja di Ibu Kota. Adalah pantas bila kemudian Pelindo II membuka program ini sebagai penghargaan tersendiri bagi para pegawainya dan masyarakat umum.

(mh)/foto:denus/parle/iw.

Fadli Zon Nilai Positif Tradisi Mudik



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) menilai positif tradisi dan budaya mudik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang hari raya

Idul Fitri setiap tahunnya.

Hal tersebut diungkapkannya saat melepas pemudik gratis yang diselenggarakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) IPC Grup di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (15/7).

“Menurut saya, tradisi mudik merupakan tradisi yang bagus, pulang kampung, berarti orang harus selalu ingat dengan kampungnya. Di sisi lain juga menghidupkan daerah yang di kunjungi,” ungkap Fadli.

Selama ini ditambahkan Fadli, memang telah terjadi sentralisasi di ibukota. Ia berharap jangan sampai terjadi urbanisasi yang nantinya malah akan menambah masalah di ibukota.

Perlu ada kota-kota satelit baru yang kuat yang bisa menjadi tempat penghidupan yang berimbang dengan Jakarta. Oleh karena itu menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, daerah-daerah pedesaan perlu dibangun.

“Jika desa atau kota-kota kecil jadi besar dan banyak pekerjaan, saya kira orang tidak akan datang ke Jakarta,” ungkap Fadli.

Dalam kesempatan itu, Fadli yang ikut mendampingi Ketua DPR RI, Setya Novanto memberangkatkan 150 bus dengan 8.500 penumpang tujuan Jawa Tengah. Sehari sebelumnya, IPC juga telah memberangkatkan pemudik dengan tujuan Sumatera. (Ayu)/foto:denus/parle/iw.

Ketua DPR Shalat Ied Di Masjid Istiqlal



Ketua DPR RI Setya Novanto shalat Ied di Masjid Istiqlal

Ketua DPR RI Setya Novanto melaksanakan Shalat Idul Fitri Jum'at pagi (17/7) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Novanto datang sekitar pukul 06.30 WIB bersama isteri Deisti A Novanto dengan membawa serta dua orang putranya.

Dari pantauan Parlementaria, tampak pula beberapa tokoh yang ikut melaksanakan Shalat Ied di Istiqlal, diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama ibu Mufidah Kalla yang datang pada pukul 06.45 WIB, tampak

hadir pula Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Turut melaksanakan Shalat Ied di Masjid Istiqlal, sejumlah pejabat tinggi negara diantaranya Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Suharso Manoarfa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menristek Dikti Muhammad Nasir, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Ada pula duta-duta besar atau perwakilan dari negara sahabat seperti Arab Saudi, Palestina, Bangladesh, dan Uni Emirat Arab.

Sebagai Imam Shalat Ied kali ini adalah Hasanuddin Sinaga dan Khatib Shalat Ied adalah Malik Madany, Shalat Ied dimulai pukul 07.00 WIB.

Masjid Istiqlal nampak sesak dengan datangnya ribuan Jamaah Shalat yang datang dari berbagai penjuru Ibu Kota. Apalagi lebaran tahun ini berbagai ormas keislaman menyatakan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh bersamaan di hari Jumat (17/7). (Naefuroji) Foto: Denus/Parle/od

Ketua DPR Gelar Open House



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi isteri menerima kunjungan silaturahmi Panglima TNI

Ketua DPR RI Setya Novanto menggelar acara *open house* dalam rangka merayakan hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Jum'at Siang (17/7) di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dari pantauan Tim Parlemen

tampak hadir beberapa pimpinan serta anggota fraksi, duta besar, dan beberapa menteri. Sejumlah anggota DPR dari F-PG seperti Mukhamad Misbakhun (Anggota Komisi XI DPR RI), Tantowi Yahya (Wakil Ketua Komisi I), Aziz Syamsudin (Ketua Komisi III).

Dalam kesempatan yang sama hadir pula Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, Rofinus Hutahuruk (anggota Komisi II DPR), Muhidin M. Said (Wakil Ketua Komisi V) dan Ferdiansyah (anggota Komisi X DPR) untuk bersilaturahmi dengan nuansa keakraban dan menikmati santapan hidangan yang telah disediakan.

Dalam memaknai hari Raya Idul Fitri, Novanto mengatakan, Idul Fitri merupakan suatu ikatan silaturahmi untuk kembali menemukan kembali fitrah Ramadhan.

Turut hadir, tamu dari kalangan pejabat negara seperti Kepala Staf Istana Kepresidenan Luhut Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Mereka disambut langsung dengan ramah oleh tuan rumah, Setya Novanto beserta istri dan anak-anaknya.

Sejumlah kolega, kerabat dan masyarakat umum terus berdatangan untuk bersilaturahmi. Acara berlangsung selama 4 jam, dimulai pukul.13.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB.

(Jaka) Foto: Denus/parle/od

Putak Itu Enak

Dalam kunjungan kerja di Kecamatan Kualin, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ketua DPR Setya Novanto berkesempatan menyaksikan proses pengolahan makanan khas masyarakat setempat yang diberi nama Putak. Salah satu kuliner asli NTT ini dibuat dari bagian tengah pohon gawang (sejenis sagu) yang diolah menjadi tepung.

“Ini menggembirakan bisa melihat langsung proses pembuatan Putak yang biasa dikonsumsi masyarakat desa Kualin. Putak ini enak kok ya apalagi kalau diolah dengan variasi tertentu,” kata Ketua DPR saat menyaksikan secara langsung proses pengolahan Putak di rumah salah seorang warga, Sabtu (11/7).

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, kalau ada yang mengatakan Putak adalah makanan ternak tidak masalah karena setelah diolah akan muncul cita rasa khas. Ia mengingatkan apabila dikonsumsi sebagai pengganti beras dan jagung, Putak perlu ditambahkan dengan gizi pelengkap lain.

Setnov begitu ia biasa dipanggil berkesempatan mengamati pengolahan Putak di rumah Agustinus Neonleni, mulai dari penjemuran sampai diolah menjadi makanan yang siap saji. Ia juga turun ke dapur membantu warga yang kebetulan sedang menggoreng Putak. “Saya sudah tidak sabar ingin mencoba, tapi saya masih puasa jadi nanti saja ya,” ujarnya disambut tawa ceria warga setempat.



Ketua DPR RI Setya Novanto memasak putak di dapur warga di NTT

Bagi masyarakat setempat Putak sering dijadikan makanan pokok alternatif, apabila beras sulit ditemukan dan kebun jagung mereka gagal panen. Hanya saja masyarakat tidak melengkapinya dengan gizi tambahan lain seperti protein. Kondisi inilah yang mengakibatkan munculnya gizi buruk di tengah masyarakat NTT. (den/iky) Foto: Denus/parle/od

DPR Akan Perjuangkan Kesejahteraan Buruh

Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjanji pihaknya akan memperjuangkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. DPR dan Pemerintah akan berkomitmen bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Hal itu disampaikan Novanto di depan ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), saat acara buka puasa bersama dengan buruh, di Kampung Pulo Kapuk, Dusun III, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/07/15).

“Kita akan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia,” tegas Novanto, yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para buruh.

Dalam kesempatan yang sama, Politisi F-PG ini juga menyoroti masalah iuran Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia yang hanya 3 persen. Padahal, di Cina iuran JHT sudah sebesar 28 persen. JHT di Indonesia dinilai sangat kecil dan tidak layak untuk kehidupan buruh.

“Akan kita sampaikan pada pemerintah agar ditinjau ulang dan direvisi,” imbuh Novanto.

Namun di sisi lain, Novanto mengapresiasi sikap pemerintah yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pencairan dana JHT, yang dinilai pro terhadap nasib buruh.

“Kita mendukung keputusan Presiden, dan secepatnya revisi itu akan dilaksanakan,” tukas Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur itu.

Dalam kesempatan yang sama, Fadli Zon (F-Gerindra) menyampaikan bahwa DPR sangat terbuka terhadap masukan dari buruh, agar nasib buruh



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon buka puasa bersama buruh di kawasan industri Cikarang

lebih baik dari sekarang. Ia meyakinkan, bahwa seluruh pihak harus terlibat dalam permasalahan kesejahteraan buruh.

“Kesejahteraan buruh adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemakmuran bagi buruh adalah kemakmuran bagi rakyat Indonesia juga,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Sebelumnya, salah seorang perwakilan dari buruh, Obon Tabroni menyampaikan permasalahan buruh saat ini masih berkulat pada upah murah dan jaminan pensiun. Selain itu kenaikan gaji buruh lima tahun sekali yang dulu dicanangkan Menteri Tenaga kerja belum terealisasi.

Obon menjelaskan, jumlah buruh di Kabupaten Bekasi menjadi yang paling banyak di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang mencapai lebih dari

750 ribu orang. Dengan jumlah buruh sebesar itu, Pemerintah dinilai belum memenuhi hak layak hidup buruh. Sebab, upah buruh masih terlampau kecil serta ada pabrik yang masih menerapkan sistem kontrak.

Obon berharap, Pimpinan DPR memperjuangkan nasib buruh, salah satunya terkait iuran JHT yang hanya 3 persen.

Usai berbuka puasa bersama, Novanto dan Fadli menyempatkan menikmati makanan di warung Tegal (Warteg) yang tidak jauh dari kontrakan 1.000 pintu. Setelah itu, ia menyempatkan melakukan sidak ke kontrakan 1.000 pintu, dan bercengkrama dengan anak-anak, yang merupakan anak-anak dari buruh. (sf) Foto: Naefuroji/parle/od

Ketua DPR : Jangan Ajak Saudara ke Jakarta

Ketua DPR RI Setya Novanto mengingatkan kepada buruh di Jakarta yang hendak pulang kampung untuk tidak mengajak saudara atau kerabatnya saat kembali ke Jakarta. Sebagaimana diketahui, terkadang seseorang yang mudik ke kampung halaman, kemudian mengajak kerabatnya

untuk ikut ke Jakarta, dengan diiming-imingi segudang lapangan kerja.

“Selamat mudik. Tapi jangan bawa saudara atau teman dari kampung halaman yang tidak memiliki keahlian atau pendidikan yang baik,” kata Novanto, usai berbuka puasa



Ketua DPR RI Setra Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diwawancara wartawan

dengan ratusan buruh di Kampung Pulo Kapuk, Dusun III, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/07/15).

Politisi F-PG ini mengatakan, sebenarnya tak ada yang salah dengan orang yang mau datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Namun, menurutnya, seharusnya orang tersebut memiliki keahlian khusus atau jenjang pendidikan

yang cukup, agar mampu bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang baik untuk masa depannya.

“Jika tidak, orang tersebut tentunya akan tersisih dari kehidupan ibu kota yang keras, sehingga sebaiknya orang tersebut tetap berada dan tinggal di kampung halaman, untuk membangun kampung halamannya,” saran Novanto.

Politisi asal Dapil NTT ini menilai, untuk tinggal dan hidup layak di ibukota yang terkenal keras ini, harus memiliki modal keahlian dan keterampilan khusus, serta pendidikan yang baik.

Ia juga berpesan kepada para buruh yang tidak mudik pulang kampung, untuk ikut menjaga keamanan di lingkungan tempatnya tinggal. Mengingat, banyak rumah yang ditinggal mudik, berpotensi mendatangkan aksi kriminal.

“Saya meminta buruh yang tidak mudik untuk menjaga harta benda rekan-rekannya yang mudik, dan selalu waspada dengan aksi pencurian dan kriminalitas lainnya, termasuk bahaya kebakaran yang akhir-akhir ini marak terjadi di Cikarang dan sekitarnya,” kata Novanto yang saat acara didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (sf) Foto: Nae-furoji/parle/od

Ketua DPR Resmikan Kampung Pendengar RRI di Takari, Kupang



Ketua DPR RI Setya Novanto meresmikan Kampung Pendengar RRI di Takari, Kupang

Ketua DPR RI Setya Novanto meresmikan Kampung Pendengar RRI di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan terbentuknya komunitas pendengar radio ini diharapkan dapat mencerahkan masyarakat dan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah yang masih masuk kategori tertinggal ini.

“Kampung Pendengar ini sangat memberikan arti yang besar sehingga masyarakat disini bisa langsung men-

dengarkan bagaimana informasi-informasi mengenai pembangunan yang ada di Indonesia. Melalui RRI masyarakat ini juga bisa menyampaikan apabila ada kendala dalam pembangunan di wilayah mereka,” katanya usai acara, Sabtu (11/7/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini meyakini, interaksi masyarakat antar daerah yang tergabung dalam Kampung Pendengar RRI di seluruh Indonesia akan memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan pembangunan. Ia secara

khusus meminta agar apa yang sudah dilakukan RRI Kupang bisa menjadi model bagi RRI di daerah lain.

Dalam kesempatan kunjungan kerja ke NTT itu, Setnov begitu ia biasa dipanggil, juga menerima aspirasi dari masyarakat terkait masalah listrik yang masih sering mati. Amalo, warga setempat mengusulkan agar pemerintah mengembangkan PLTA karena di wilayah ini terdapat potensi daya listrik dari air terjun yang cukup besar.

“Pak Ketua, listrik di sini seminggu bisa mati 2-3 kali. Sementara di wilayah kita mempunyai air terjun besar dengan debit 134 liter. Kita mengusulkan untuk dijadikan PLTA sehingga bisa membuat daerah tidak kekurangan listrik,” ujar Amalo. Aspirasi lain yang disampaikan adalah keinginan masyarakat untuk membuka kawasan hutan untuk dijadikan pemukiman.

Menanggapi hal ini Ketua DPR berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada Dirut PLN dan Menteri BUMN. “Upaya untuk memenuhi listrik bagi seluruh wilayah sudah sesuai dengan instruksi Presiden,” jelasnya. Terkait permintaan izin membuka lahan hutan, ia menyebut perlu dikomunikasikan dengan Menteri Kehutanan. (den/iky) foto: Denus/parle/od

BPK Serahkan Hasil Audit KPU

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil auditnya kepada Pimpinan DPR RI menyangkut kesiapan anggaran pilkada serentak. Hasil audit juga memuat pemeriksaan anggaran pada pemilu 2014.

Pimpinan DPR RI yang terdiri dari Ketua DPR Setya Novanto dan dua wakilnya, Agus Hemanto dan Taufik Kurniawan menerima langsung kedatangan Pimpinan BPK yang terdiri dari Ketua BPK Harry Azhar Aziz dan Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi, Senin (13/7). Pertemuan yang dipimpin oleh Taufik Kurniawan itu, mendengarkan langsung laporan BPK soal audit anggaran kesiapan pilkada serentak.

Audit yang dilakukan BPK ini, merupakan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diminta oleh Pimpinan DPR RI. Sebelumnya Pimpinan DPR juga telah menerima surat dari Pimpinan Komisi II perihal permintaan audit kinerja KPU jelang pilkada serentak akhir tahun ini. Dalam penilaiannya, BPK tak meyakini alokasi anggaran untuk pilkada serentak termasuk anggaran pengamanannya. Hadir dalam pertemuan tersebut Pimpinan Komisi II dan III DPR.

“Audit kinerja KPU didasarkan pada keinginan dari seluruh rekan-rekan di Komisi II terhadap tindak lanjut dari audit kinerja pemilu 2014 dan rencana kinerja pilkada serentak,” jelas Taufik



Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Komisi II DPR menerima hasil audit KPU dari BPK

dalam pertemuan itu. Taufik menambahkan, pilkada serentak ini ingin terlaksana secara tertib, aman, dan konstitusional. Keinginan audit ini jauh dari keinginan untuk menunda pilkada serentak.

BPK menilai, penyediaan anggaran pilkada serentak belum sesuai ketentuan. Banyak pemda belum mengajukan anggaran pilkada serentak dan biaya pengamanan juga belum dipastikan kebenarannya. Apalagi, tahapan pilkada, nilai BPK, belum sesuai dengan jadwal. Di sisi lain, banyak KPUD tidak segera mengajukan kebutuhan anggaran untuk pilkada serentak ini.

Semua ini harus menjadi perhatian pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri. Ada beberapa Pemendagri yang harus direvisi menyusul temuan audit BPK ini. Kemudian yang menjadi permasalahan lain adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD antara Pemda dengan penerima hibah. NHPD ini didasari Permendagri No.32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Dengan banyak temuan ini, pilkada serentak pun terancam, waktu maupun pengamanannya. (mh)/
foto:jaka/parole/iw.

Banyak Tunggakan RUU Yang Harus Segera Diselesaikan



Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015

Pada Masa Sidang IV DPR terus berupaya untuk menyelesaikan penyusunan beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2015. Berbagai upaya dilakukan baik melalui Rapat Kerja, RDP, dan RDPU, maupun kunjungan kerja untuk memperoleh masukan dari masyarakat (*stakeholder*) dalam rangka membentuk undang-undang yang adaptif, responsif, dan aspiratif bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua DPR Setya Novanto mengemukakan hal itu saat membacakan pidato Penutupan Masa Persidangan IV tahun 2014/2015 di depan Sidang Paripurna, belum lama ini.

Dia menekankan, DPR bersama pemerintah perlu lebih konsentrasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, terutama untuk menyelesaikan Prioritas Prolegnas Tahun 2015 dalam kurun waktu yang tersisa karena banyak tunggakan RUU yang harus diselesaikan segera.

Selama Masa Sidang IV, DPR melakukan revisi terhadap Prioritas Prolegnas Tahun 2015, diantaranya menambah RUU tentang KPK, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Kebudayaan. Revisi Prioritas Prolegnas Tahun 2015 juga dilakukan dengan mengganti RUU tentang Ketahanan Pangan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta mengganti RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan RUU tentang Bea Materai.

Dewan juga telah menyetujui 3 (tiga) rancangan undang-undang yaitu RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Penjaminan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Selain itu, ada 6 (enam) rancangan undang-undang yang

berada pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi, yaitu RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Jasa Konstruksi, RUU tentang Pertembakauan, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Sistem Perbukuan, dan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Sementara Pemerintah mengajukan ke DPR 4 (empat) RUU, yaitu RUU tentang Merek, RUU tentang KUHP, RUU tentang Paten, dan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. DPR melalui Bamus sudah menetapkan Alat Kelengkapan DPR yang akan melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah. Keempat RUU tersebut akan dimulai pembahasannya pada Masa Sidang yang akan dibuka pada 14 Agustus mendatang. (mp)/foto:andri/parle/iw.

Indonesia Darurat Kekerasan dan Kejahatan Terhadap Anak



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak menyebut kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak saat ini sudah dapat digolongkan pada tindakan mafia. Hal ini diungkapkannya terkait peringatan hari anak yang jatuh tepat pada hari ini, Kamis (23/7).

“Saat ini Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai darurat kekerasan terhadap anak. Bahkan dalam beberapa kasus sudah dapat digolongkan pada tindakan mafia, dimana hal itu dilakukan secara bersama-sama oleh

orang dewasa dan terorganisir untuk sebuah tujuan tertentu. Sebut saja kasus pembunuhan si kecil Engeline di Bali beberapa waktu lalu,” ungkap Deding.

Ditambahkannya, karena keterbatasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang, maka anak membutuhkan perlindungan orang dewasa, baik orangtua, anggota keluarga lainnya dan masyarakat umum termasuk guru dan pengasuh. Sayangnya orang dewasa yang seharusnya memberi perlindungan pada si anak, malah kerap berlaku sebaliknya. Mulai dari kekerasan yang dilakukan tanpa sengaja seperti kekerasan emosional, sampai pada kekerasan fisik yang menyebabkan si anak terluka bahkan meninggal dunia.

Deding mengatakan, sejatinya perangkat hukum di Indonesia terkait perlindungan anak sudah cukup memadai, namun pelaksanaannya yang masih sangat minim. Undang-undang No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No.23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, dikatakan Deding sudah relatif mengakomodir seluruh hak anak dan kewajiban orang dewasa terhadap anak, disertai sanksi yang akan dikenakan jika ada pelanggaran terhadap pasal-pasal yang ada.

“Sebagian orang yang menganggap hukuman atau sanksi kekerasan terhadap anak yang tertera dalam UU Perlindungan Anak masih tergolong rendah, itu sah-sah saja. Jika kemudian ada tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan sanksi tersebut, ke depan akan kami dalam lagi. Demi untuk memberikan perlindungan yang utuh terhadap anak sebagai generasi penerus, jika memang diperlukan ya akan kami revisi Undang-undang tersebut,” jelas Deding.

Namun menurut Deding, yang paling penting dari semua undang-undang itu adalah sosialisasi dan implementasi di masyarakat. Undang-undang hanya akan jadi sebuah aturan dalam kertas, jika pelaksanaannya sama sekali tidak mengikuti aturan yang ada. (Ayu) Foto: andri/parle/od

Terkait Tolikara, Pernyataan Pemerintah Dinilai Simpang Siur

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk tidak memberikan pernyataan yang simpang siur terkait tragedi Tolikara, Papua beberapa waktu lalu. Pasalnya, pernyataan yang simpang siur bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian informasi.

Hal ini menurut Saleh terlihat jelas dalam penjelasan

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait adanya Perda yang melarang rumah ibadah Islam memakai pengeras suara di Tolikara.

“Kemarin Wapres mengklarifikasi pernyataannya terkait penyebab kerusakan. Awalnya, Wapres menduga bahwa kerusakan terjadi karena pengeras suara. Setelah banyak



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

yang mengecam, Wapres lalu meluruskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa di sana memang ada Perda yang melarang pemakaian pengeras suara,” ujar Saleh belum lama ini.

Pernyataan Wapres tersebut kemudian dibantah oleh Menteri Agama. Menurut Menag, tidak benar bahwa di sana ada Perda seperti itu. Walaupun Menag sendiri mengakui adanya wacana ke arah pembuatan Perda tersebut.

Pernyataan berbeda tersebut dinilai politisi dari Fraksi PAN ini menunjukkan tidak adanya informasi valid yang diterima pemerintah pusat. Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses penanganan dan pengusutan kasus tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin perbedaan informasi ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di sana.

“Sebagai pembantu Presiden dan Wapres, Menag semestinya secara proaktif memberikan informasi yang benar kepada atasannya. Jangan sampai, informasi pihak lain yang tidak otoritatif dijadikan rujukan. Dan tidak sepatutnya, Wapres salah dalam memberikan pernyataan,” pungkasnya. (Ayu) foto: iwan armanias/parle/od

Pemerintah Wajib Evaluasi Harga Minyak

Menyusul harga minyak global yang mengalami tren penurunan hingga US\$50 per barel, pemerintah pun diimbau untuk segera mengevaluasi kebijakannya di sektor migas. Harga minyak dunia diprediksi akan terus turun, karena kembalinya Iran ke pasar global usai perundingan nuklir yang alot selama sepuluh tahun.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menegaskan hal tersebut dalam rilisnya yang diterima Parlemtaria, Rabu (22/7). Hafisz mengutip data dari AFP bahwa minyak mentah *light sweet* atau *west texas intermediate* anjlok hingga US\$1,63 untuk penyerahan Agustus dan ditutup pada US\$51,41 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah *brent north*

sea juga turun US\$1,65 dan menetap di harga US\$56,86 per barel.

“Sepanjang pengalaman saya yang telah menggeluti industri hulu migas dengan menjadi *managing director* di beberapa perusahaan migas nasional sejak 1998 ini, kebijakan Pemerintahan Jokowi yang telah mencabut subsidi BBM dan menyerahkan pada mekanisme pasar, maka pemerintah wajib mengevaluasi kembali harga BBM dari harga yang ditetapkan saat ini,” seraya menambahkan, “Saya selaku Ketua DPP PAN juga menegaskan, bila perlu saat ini juga pemerintah menurunkan kembali harga BBM sesuai harga keekonomian,” tandas Hafisz.

Politisi asal dapil Sumsel I itu, menilai, menurunkan harga BBM penting



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

untuk membangkitkan perekonomian nasional yang sedang lesu. Dengan menurunkan harga BBM, daya beli masyarakat juga diharapkan meningkat setelah sekian lama terpuruk dan tak mampu menekan laju inflasi.

“Kalau mau adil, kebijakan pemerintah yang menyerahkan mekanisme pasar ini sebenarnya bertentangan dengan konstitusi sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemerintah harus hadir untuk rakyat,” imbuhnya. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od

Komisi VIII Minta Pemerintah Tangani Pengemis dan Pengamen Anak

Menjelang hari raya Idul Fitri, jumlah anak-anak yang mengemis dan mengemis biasanya semakin banyak. Sebagian di antaranya justru diajak oleh orang tuanya mengemis bersama. Bahkan tidak jarang terlihat pemandangan dimana ada satu keluarga duduk di pinggir jalan, lengkap dengan

gerobak dorong. Seakan tidak punya pilihan lain, mereka bersama-sama menengadahkan tangan meminta-minta kepada para pengguna jalan yang lalu lalang.

Kondisi seperti itu menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay sejatinya bisa dihindari, jika Kemen-



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) beserta Kementerian Sosial (Kemensos) bersungguh-sungguh mencari solusi atas semua itu. KPP&PA dengan jaringan dan fungsi koordinatifnya semestinya bisa mengambil langkah-langkah konkrit agar anak-anak tidak ikut dalam mencari uang.

Sementara itu, Kementerian sosial memiliki banyak panti

asuhan yang tersebar di berbagai wilayah yang memang diperuntukkan untuk menampung anak-anak terlantar. Tidak hanya itu, Kemensos juga memiliki program perlindungan dan jaminan sosial yang cukup besar. Program-program itu tentu bisa ditawarkan kepada keluarga-keluarga miskin tersebut.

“Ada yang beralasan bahwa keluarga-keluarga seperti itu tidak mau dibina. Mereka lebih memilih menjadi keluarga pengemis di jalanan. Alasan seperti ini tidak benar. Justru tugas KPP&PA beserta Kemensos adalah membina dan memberikan penyuluhan kepada mereka. Dan jika perlu, Kemensos bisa mengucurkan bantuan modal usaha kepada orang-orang tua yang menjadi pengemis di jalanan,” ujar Saleh.

Untuk itulah, Anggota Fraksi PAN, Dapil Sumut II ini menantang KPP&PA serta Kemensos untuk membuktikan kerja konkritnya dengan membersihkan kota-kota besar dari para pengamen dan pengemis anak-anak. Akhir bulan Ramadan ini, bisa dijadikan *moment* untuk melakukan semua itu. Masa depan anak-anak tersebut perlu diperhatikan agar bisa menjadi modal besar pembangunan ke depan. Karena anak merupakan generasi penerus dan harapan bangsa ini.

“Kalau program ini berhasil, saya yakin KPP&PA serta Kemensos akan sangat dirasakan kehadirannya. Tidak usahlah repot membuat program yang ‘hebat’, cukup merumuskan bagaimana agar anak-anak jalanan kembali bermain dan belajar sesuai dengan perkembangan usianya,” tegas Saleh.

(Ayu) Foto: andri/parle/od

Kondisi Global Pengaruhi Penerimaan Negara

Kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan, tak dipungkiri mempengaruhi kondisi ekonomi internal Indonesia. Bahkan, turut mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan pertumbuhan investasi. Hal ini ditengarai menjadi salah satu penyebab target penerimaan negara sulit tercapai.

Demikian diutarakan Anggota Komisi XI DPR Henky Kurniadi, usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (8/07/15). Tim Kunker Komisi XI DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan (F-PD).

“Para pelaku pasar itu mungkin tertekan dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena kondisi global atau faktor eksternal itu lebih rentan daripada faktor internal,” kata Henky.

Politisi F-PDI Perjuangan ini melihat, walaupun kebijakan fiskal dan moneter Indonesia semuanya sudah benar dan *on the track*, namun Henky menilai hal itu belum cukup menghadapi tantangan eksternal yang luar biasa.

“Contohnya masalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Efek ini bukan hanya berdampak terdapat di Indonesia, tapi juga seluruh dunia. Bukan berarti kurs Indonesia bukan yang paling jelek. Euro lebih parah, Ringgit Malaysia juga,” analisa Henky.

Politisi asal Dapil Jawa Timur ini melihat sebenarnya Indonesia masih mampu bertahan dengan perlambatan



Anggota Komisi XI DPR Henky Kurniadi

ekonomi global, namun siklus ini harus dilalui. Ramalan *The Fed* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun mendatang akan tumbuh lebih baik. Namun Henky mengingatkan pemerintah agar tetap berhati-hati di tahun mendatang.

“Tapi kita harus optimis, pasar harus dikembangkan dengan optimisme, sehingga arus investasi masuk. Kalau tidak ada investasi, penerimaan negara akan semakin berat.



Kalau tidak ada *income* yang bagus, bagaimana masyarakat mempunyai konsumsi yang tinggi dan menarik pajak,” kata Henky seolah bertanya.

Henky menambahkan, penerimaan negara dari sektor pajak sangat terkait dengan kebijakan sektor riil dan kebijakan fiskal. Ia juga mengingatkan agar jangsan sampai muncul

ego sektoral antar pemangku kepentingan, sehingga dapat tercipta sinergi di Pemerintah.

“Sekarang ini merupakan kesempatan kita untuk menata secara struktur ekonomi kita, untuk lebih bagus ke depannya,” tutup Henky. (sf) Foto: Sofyan/parle/od

BPOM Diminta Lakukan Riset Formula Pengawet Makanan



Tim kunker Komisi IX DPR saat kunjungan ke Badan POM Semarang

Komisi IX DPR RI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang untuk melakukan riset formula pengawet makanan yang tidak membahayakan manusia. Mengingat selama ini tidak ada standar dari BPOM untuk pengawet makanan yang aman.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat melakukan kunjungan kerja ke BPOM Semarang, (10/7).

Apalagi, kata Ermalena, memasuki lebaran banyak makanan yang dijual menggunakan bahan berbahaya. Un-

tuk itu Komisi IX DPR dalam Reses Masa Sidang IV tahun 2014 - 2015 mengunjungi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Semarang untuk melihat secara langsung kegiatan pengecekan makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Disamping itu, kita juga ingin menghitung sumber daya manusianya sudah cukup apa belum, saat pertemuan dengan BPOM dijelaskan untuk Jawa Tengah dari 144 staf hanya ada 44 apoteker. Jumlah itu pasti tidak mencukupi untuk mengcover seluruh Jawa

Tengah. Selain itu, *test kit* yang dimiliki hanya hal tertentu tidak bisa di cek di lapangan dan harus dibawa ke laboratorium.

Lebih lanjut Ermalena mengatakan, BPOM sekarang sangat dibutuhkan untuk mengawasi peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya. “Kunjungan Komisi IX DPR ini juga bertujuan mendengar dan melihat langsung kendala apa saja yang dihadapi BPOM Semarang,” kata Ermalena.

Ermalena juga mengatakan salah satu yang diinginkan sekarang adalah bagaimana membuat undang-undang (UU) khusus tentang BPOM. Karena dengan adanya UU ini akan lebih jelas *punishment* yang diberikan bagi si pelanggar. “Mudah-mudahan periode lima tahun ini bisa kita golkan UU ini. Kalau UU ini ada mungkin menjadi kekuatan tersendiri bagi BPOM,” ujarnya.

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ini mendapat sambutan baik seluruh karyawan. Kepala BPOM Semarang, Agus Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX.

Seusai tanya jawab dan ramah tamah, acara dilanjutkan dengan kunjungan ke ruang ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) dan Laboratorium. Ketua dan anggota Komisi IX DPR sangat antusias dan mengapresiasi kinerja pegawai BPOM Semarang. (man)/foto:andri/parle/iw.

Masyarakat Klaten dan Boyolali Nikmati Pasar Murah

Jelang Idul Fitri, masyarakat di Kabupaten Klaten dan Boyolali menikmati pasar murah yang digelar mitra Komisi VI DPR, Perum Bulog, PTPN IX, dan BRI. Dengan hanya membayar Rp30 ribu, mereka sudah mendapatkan paket beras kualitas terbaik seberat 5 kg dan gula 1 kg.

Masyarakat di dua kabupaten itu sangat antusias dan terlihat bahagia mendapatkan paket murah tersebut. Acara pasar murah ini diprakarsai Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani dari dapil Jawa Tengah V (Klaten, Boyolali, Solo, Sukoharjo). Pasar murah yang digelar pada

Sabtu dan Minggu (11-12/7) itu, berlokasi di tiga tempat, yaitu Kadirejo, Karanganom, Klaten, dan dua tempat lainnya adalah Musuk serta Winong di Boyolali.

Ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian wakil rakyat kepada rakyat kecil yang diwakilinya. Endang sendiri mengundang langsung Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono untuk membagikan paket dalam pasar murah tersebut. “Pasar murah ini bentuk penghormatan kepada rakyat kecil, agar tak selalu menengadahkan tangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat,” tutur Endang.

Sementara Direktur Bulog Wahyu Suparyono di tengah pasar murah mengatakan, pemerintah selalu berusaha tanggap dengan beban rakyat kecil yang daya belinya terus menurun. Bulog memberikan diskon harga 50 persen untuk beras dan gula. Wahyu juga mengungkapkan, pada Ramadan lalu, stok beras untuk Jawa Tengah sangat aman. “Bulog selalu hadir untuk layani masyarakat. Kami sudah bekerja sama dengan PTPN IX dan BRI untuk pasar murah ini. Ini sinergi untuk membangun negeri,” katanya.

Juarti, salah satu warga Boyolali usai menerima paket murah mengaku senang mendapatkan 5 kg beras dan 1 kg gula. “Saya senang ada pasar mu-



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani meninjau pasar murah di Boyolali

rah. Harganya murah dan terjangkau. Terima kasih buat Ibu Endang yang mengadakan pasar murah ini,” akunya penuh bahagia.

Lewat ide pasar murah ini, Endang yang politisi Partai Golkar itu, ingin selalu berdekatan dengan rakyat kecil dan mengomunikasikan dengan baik

program-program kerjanya kepada masyarakat. Dan masyarakat di dua kabupaten juga mengenal lebih dekat wakilnya yang duduk di DPR RI. “Saya senang melihat masyarakat begitu antusias dan bahagia mendapat paket murah sembako ini,” imbuhnya. (mh)/
foto:husen/parle/iw

Warga Boyolali Dapat Pengobatan Gratis



Anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani mengadakan bakti sosial pengobatan gratis

Warga Balai Desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah, Jum'at (10/7) berbondong-bondong mengikuti pengobatan gratis dan pemberian vaksin flubio berikut pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Kegiatan pelayanan kesehatan massal dan vaksin flubio ini diselenggarakan oleh PT. Bio Farma (Persero) salah satu mitra kerja dari Komisi VI. “Komisi VI dan Bio Farma harus saling bersinergi dan bersama-sama untuk menjalankan program yang telah ditetapkan. Kalau tidak kita lakukan bersama-sama tidak bersinergi seperti ini lalu bagaimana untuk penyerapan ke masyarakat,” ujar Endang Srikarti Handayani saat meninjau kegiatan bakti sosial pengobatan massal bagi masyarakat Desa Wonosegoro, Boyolali.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, vaksin ini dikhususkan untuk menangkali beberapa jenis penyakit

influenza umum, dan manusia yang mendapat vaksinasi ini akan bebas dari penyakit flu selama setahun ke depan.

Menurutnya, PT. Bio Farma (Persero) ini adalah salah satu mitra kerja Komisi VI, oleh karenanya kita menggandeng PT. Bio Farma sebagai produsen vaksin flubio untuk melakukan vaksinasi di Boyolali yang dipusatkan di Balai Desa Wonosegoro.

“PT. Bio Farma (Persero) melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) menyediakan 1.000 vaksin flubio. Dengan divaksin ini maka akan terbebas dari sakit flu dalam satu tahun kedepan dan vaksin ini sangat mahal tetapi untuk kegiatan kesehatan massal diberikan secara cuma-cuma,” jelasnya.

Apalagi, kata Endang, di musim kemarau seperti sekarang ini wilayahnya tandus dan kering, masyarakat rentan terkena penyakit karena kondisi lingkungan ataupun konsumsi air yang tak higienis, kata Endang seraya menambahkan Desa Wonosegoro ini jauh dari pusat kota dan pelayanan kesehatan kurang tersentuh.

Menurutnya, selama ini pemerintah kurang memberikan perhatian kesehatan kepada masyarakat di daerah pinggiran. Sementara, biaya pengobatan di rumah sakit sangat mahal. Pemerintah harusnya memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan masyarakat pinggiran ini, jangan diabaikan,” tegasnya.

Vaksin flubio ini masih langka dan

harganya cukup mahal untuk kantong masyarakat kebanyakan. Sekali suntik di rumah sakit harus membayar Rp 250 hingga Rp 300 ribu. Program vaksinasi ini harus betul-betul dimanfaatkan warga Wonosegoro dan sekitarnya. “Menjelang lebaran ini masyarakat Wonosegoro kesehatannya harus terjamin, jadi selain 1.000 vaksin flubio masyarakat juga mendapat pemeriksaan dan pengobatan gratis,” pungkasnya.

Sementara warga Desa Wonosegoro mengaku senang dengan adanya kegiatan pengobatan massal ini, selain mendapatkan vaksin flubio juga dilakukan pemeriksaan dan konsultasi masalah kesehatan secara gratis.(iw)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Negara Harus Hadir dalam Permasalahan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ke II tahun 2015 ini diprediksi akan meningkat dan prospektif dibanding kuartal I tahun 2015. Namun, Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir menilai, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat dan sangat lesu.

Dony menilai, selain diakibatkan oleh faktor eksternal, hal ini juga disebabkan adanya faktor internal juga. Untuk itu, ia meminta negara untuk hadir dalam permasalahan ekonomi ini. Hal itu ia sampaikan usai hadir pada rangkaian acara Kunjungan Kerja Komisi XI DPR ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (9/07/15).

“Negara harus hadir untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Bagaimana pelambatan ekonomi bisa dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Misalnya kebijakan seperti mempercepat belanja pemerintah (*government expenditure*) dan dipercepat daya serap anggarannya,” kata Dony.

Politisi F-PPP ini yakin, dengan penyerapan anggaran yang baik oleh Pemerintah, hal ini dapat menimbulkan multiplier effect dan menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Dampak dari percepatan belanja negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun hal ini harus dilakukan serentak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten dan Kota. Tentu juga dengan didorong sektor investasi yang lebih banyak lagi,” ingat Dony.

Politisi asal Dapil Jawa Barat IX ini menambahkan, Pemerintah juga perlu menggerakkan sektor riil dan sektor produktif yang selama ini sudah berjalan. Ia menilai, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Karena sektor kecil seperti UMKM ini, tidak terpengaruh oleh krisis-krisis yang ada. UMKM bisa didorong melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan digelontorkannya KUR



Anggota Komisi XI DPR Dony Ahmad Munir

ini, setidaknya ekonomi masyarakat akan bergerak. Ini salah satu contoh negara hadir dalam permasalahan ekonomi,” imbuh Dony.

Selain itu, tambah Dony, perlu ada sinergitas antara seluruh komponen negara. Yakni Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, tak terkecuali DPR untuk sama-sama berkomitmen mengatasi pelambatan ekonomi yang terjadi.

“Sehingga kita tidak terus menerus menyalahkan faktor eksternal. Kalau fundamental ekonomi kita kuat, sebesar apapun faktor eksternal akan bisa kita hadapi. Kita akan tangguh menghadapi berbagai gejolak apapun,” yakin Dony sembari menutup wawancara. (sf) Foto: Sofyan/parle/od

Penambahan SDM Tak Jamin Peningkatan Pajak

Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menegaskan, penambahan jumlah Sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Pajak tak menjamin peningkatan penerimaan pajak secara signifikan. Justru, penambahan SDM malah menambah beban biaya negara.

Demikian ditegaskan Marwan usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR dengan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi DI Yogyakarta, di Yogyakarta, Rabu (8/07).

“Persoalan SDM itu selalu begitu, selalu dikeluhkan kurang. Tapi apakah jadi jaminan bahwa SDM yang banyak akan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan? Yang sudah pasti, pengeluaran biaya tetap akan meningkat, karena akan ada biaya tetap yang dikeluarkan oleh negara untuk menggaji dan membiayai SDM itu,” tegas Marwan.

Politisi F-PD ini lebih menyarankan agar Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperhatikan distribusi SDM. Apalagi, ia mendapat kabar ada penambahan jumlah SDM di DJP tahun ini.

“Kalau tidak salah, tahun ini DJP merekrut SDM baru sekitar 6.000 orang. Itu bagaimana distribusinya? Nah, DJP Yogyakarta itu dapat berapa,” tanya Marwan.

Namun, tambah Politisi asal Dapil



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan

Lampung II ini, jika memang dengan penambahan SDM secara kualitas dan kuantitas dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak, tentu pihaknya akan mendukung. Karena biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan sebagainya akan terkompensasi dengan penerimaan negara yang didapatkan.

“Tetapi harus dilihat lagi, apakah betul seperti itu kondisinya. Apakah SDM yang ada saat ini sudah cukup optimal dalam menggali potensi seluruh wajib pajak,” ingat Marwan, yang saat itu memimpin Tim Kunker Komisi XI DPR.

Terkait dengan remunerasi yang selama ini sudah diberikan kepada pegawai DJP, Marwan menilai ini langkah yang bagus. Namun, akibat ada-

nya penurunan pajak di nasional dan kondisi ekonomi yang lesu, sehingga pemberian remunerasi itu belum signifikan memacu kinerja DJP secara maksimal.

“Untuk itu, sebelum kita tetapkan remunerasi untuk tahun anggaran 2016, kita akan adakan evaluasi, seberapa efektif remunerasi itu memberikan stimulus atau semangat kepada pegawai DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak,” imbuh Marwan.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kemenkeu Provinsi DI Yogyakarta, Rudi Bastari, memaparkan bahwa salah satu kendala dalam memperlancar dan meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Yogyakarta adalah masalah keterbatasan jumlah SDM.

Rudi menjelaskan, saat ini jumlah wajib pajak (WP) di Yogyakarta sebanyak 386.844 orang. Sedangkan, jumlah Account Representative (AR) hanya 148 orang, dan fungsional hanya 53 orang. Dengan begitu, 1 pegawai AR mengawasi 2.614 WP, dan 1 orang fungsional menangani 7.299 WP.

“Mungkin perlu dipertimbangkan agar dapat mengawasi lebih optimal, seorang AR atau WP misalnya tidak lebih dari 100 WP,” jelas Rudi.

Rudi juga mengatakan, pada tahun 2014, Kanwil DJP Yogyakarta menargetkan penerimaan sektor pajak sebesar Rp 3,403 triliun, namun hanya terealisasi sebesar 90,65 persen atau Rp 3,085 triliun. (sf) Foto: Sofyan/parle/od

Komisi IX Desak Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua

Komisi IX DPR mendesak Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44,45, dan 46 Tahun 2015 terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (PP), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT). Inilah bentuk pengawasan DPR terhadap hak-hak pekerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena menegaskan, pencairan JHT di atas 10 tahun merupakan salah satu contoh mismanajemen pemerintah. Aturan soal JHT ini tertuang di Pasal 37 ayat 3 Undang-undang No.40 Tahun 2004

tentang SJSN, sementara teknisnya ada di PP.

“Memang di dalam UU 40 tahun 2004 SJSN tidak ada mekanisme atau skema bagi mereka yang berhenti bekerja. Seperti putus hubungan kerja (PHK) karena hukum/perjanjian kerjanya habis, karena berselisih atau mengundurkan diri. Tapi skema ini kita akan masukkan ke dalam perubahan PP ini,” lanjutnya.

“Jadi harusnya ada ruang buat buruh dalam kondisi tertentu bisa diambil uangnya, misalnya saat kontrak kerjanya habis atau kena Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) sehingga mereka mengharapkan hidup dari JHT,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Semarang, Jum’at (10/7/2015).

Menurut politisi PPP, ini persoalan serius karena aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp 200 triliun bukanlah uang yang sedikit. Pundi-pundi uang yang tersimpan di BPJS tersebut merupakan uang pekerja yang diambil dari potongan upah tiap bulannya.

Komisi IX pun mendesak pemerintah merevisi PP tersebut. Pertama, kata Ermalena dengan mencabut PP JHT



Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena berdialog dengan salah satu pasien di RS. Tugurejo

baru, lalu merevisinya dan memasukkan aturan lama ke dalam revisi yakni JHT bisa diambil dengan masa kepesertaan 5 tahun.

“Itu kan bukan uang pemerintah. Jadi minta PP tentang JHT di revisi. Aturan lama dimasukkan lagi ke peraturan baru. Di mana 5 tahun bisa diambil,” paparnya.

Di samping itu, dijelaskan Ermalena, Komisi IX DPR juga berharap pemerintah merevisi jaminan pensiun yang akan diberikan setiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sudah diberlakukan di negara lain. Pemerintah telah menetapkan iuran pensiun 3 persen, yakni 1 persen dari pekerja dan pengusaha 2 persen.

“Makanya pekerja di seluruh Indonesia harus bergerak bersama. Ini hak pekerja. Saya berharap Menaker hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX, sebab sudah dua kali raker, tidak dihadiri pak menteri. Padahal ini penting,” tegas Ermalena. Komisi IX akan mengadakan raker kembali terkait JHT setelah reses ini. (man)/foto:andri/parle/iw.

Komisi IX Minta RSUD Tugurejo Tingkatkan Fasilitas

Komisi IX DPR RI meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut termasuk akreditasi rumah sakit, agar dapat melayani masyarakat lebih baik.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Jateng baru-baru ini.

Di Rumah Sakit Tugurejo ini, Tim Komisi IX DPR menyoroti tentang pelayanan kesehatan, seperti pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), fasilitas kesehatan serta pelayanan dan akreditasi rumah sakit.

RSUD Tugurejo merupakan Rumah Sakit Kelas B milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Semarang Bagian Barat dengan Kapasitas 389 Tempat Tidur (Oktober 2014). Luas tanah 36.681 m², luas bangunan 24.413 m² terdiri dari gedung rawat jalan, gedung IGD, 8 bangsal perawatan, kamar bedah, kamar bersalin, bagian penunjang, kantor, auditorium dan wisma.

Komisi IX DPR menyampaikan apresiasi kepada rumah sakit Tugurejo



Tim Kunker Komisi IX DPR meninjau beberapa ruangan RS Tugurejo

karena mengembangkan sistem pendaftaran menggunakan SMS, sehingga mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit tersebut.

Pertemuan diisi dengan tanya jawab antara anggota dewan dengan para

kepala SKPD antara lain Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Direktur Utama RSUD Tugurejo, serta perwakilan dari BPJS dan Balai POM Semarang. (andri)/foto:andri/parle/iw.

Dewan Kecewa Terhadap Putusan MK



Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria didampingi mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansjah Djohan, dan pakar hukum tata negara Margarito dalam acara Forum Legislasi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait politik dinasti dalam pilkada serentak 2015 nanti. Atas putusan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan MK tersebut yang kembali melanggengkan dinasti politik.

Padahal menurutnya, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah.

“Apalagi petahana, *incumbent* sebagai pengguna anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah sampai triliunan rupiah, yang bisa memastikan program sesuai kepentingan politiknya, sehingga daerahnya tetap tertinggal dan rakyatnya miskin. Untuk itu UU Pilkada memberikan jeda waktu 5 tahun untuk *incumbent* agar bisa mencalonkan kembali dalam Pilkada,” tegas politisi Gerindra itu dalam dialektika demokrasi bertema “MK Melegalkan Dinasti Politik” bersama mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansjah Djohan, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/7).

Dinasti politik kata Riza, juga menutup peluang generasi muda dan putra terbaik daerah yang lain untuk meng-

abdikan di daerahnya, maka perlu keberpihakan melalui sistem. “Tapi, kalau MK sudah memutuskan, maka sampai kiamat pun raja-raja kecil di daerah itu akan terus ada. Kalau MK mengatakan melanggar UUD 1945, bahwa ini untuk menjalankan dan membangun sistem keberpihakan,” ujarnya.

Untuk itu dia meminta parpol untuk melakukan, pertama, tidak merekomendasikan *incumbent* kecuali putra terbaik daerah yang harus diberi kesempatan untuk maju dalam Pilkada. Kedua, ormas dan media agar terus melakukan edukasi politik dan tak tergiur uang dalam memilih calon pemimpin daerah. “Rakyat jangan tergiur Rp 100 ribu, Rp 500 ribu dan sampai Rp 1 juta,” tambahnya.

Ketiga, masyarakat harus menyelidiki kasus-kasus *incumbent* selama memimpin di daerah. Sebab, majunya *incumbent* dan keluarganya dalam Pilkada selalu ada kepentingan lain yang akan disembunyikan, yaitu menutupi, menjaga agar kasusnya tidak terungkap. “Korupsi di daerah sulit terungkap karena saling sandera dengan birokrasi, pengusaha dan lain-lain. Karena itu, banyak yang menjadi boneka *incumbent* untuk menutupi kasus bahkan disiapkan untuk maju dalam Pilkada,” jelasnya.

Namun demikian tegas Riza, putusan MK ini tidak serta-merta kita harus merevisi UU Pilkada, karena cukup dengan merevisi kembali peraturan

komisi pemilihan umum (PKPU), juga peraturan Bawaslu sesuai dengan putusan MK, meski idealnya dengan merevisi UU Pilkada, tapi tidak dalam waktu dekat ini. “Putusan MK itu seolah melihat Indonesia ini sudah seperti Amerika, yang sudah terdidik dan demokrasinya cukup matang,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansjah Djohan menyampaikan selamat atas berkembang-biaknya dinasti politik dengan putusan MK tersebut, sehingga upaya untuk memperbaiki pemerintahan ini terancam gagal. Padahal, dalam penelitian pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 sekitar 10 tahun terakhir ini politik kekerabatan makin serius.

“Pada 2013 terdapat 61 kasus politik dinasti atau 11% terjadi penyimpangan. Apakah ini mau dibiarkan? Kita ini bukan melarang, tapi membatasi akibat penyimpangan kekuasaan yang menumpuk. Seperti pembatasan Presiden RI sebanyak dua kali, dan kalau ada calon memiliki hubungan kekerabatan dengan *incumbent* diberi jeda 5 tahun,” tegas Djohermansjah.

Sebab, yang namanya *incumbent* itu kata Djohermansjah, pasti ada pengaruh dalam politik, yaitu bisa mempengaruhi birokrasi, PNS dan rakyat. Alhasil tumbuh AMPI (anak, menantu, ponakan dan istri) selama Pilkada ini. Bahkan Ampu itu di tahun 2014 merambah ke legislatif dari pusat sampai daerah. “Ini masyarakat feodal, paternalistik, maka perlu rambu-rambu. Jadi, di MK itu perlu hakim yang memiliki terobosan dengan melihat sosio Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu Margarito Kamis menilai putusan MK itu sudah tepat, dan kita tidak perlu takut dengan dinasti politik, karena tidak ada alasan yang rasional untuk menangguk dan menghalangi seseorang maju dalam Pilkada akibat memiliki hubungan kekerabatan. “Jadi, putusan MK itu sudah tepat. Bahwa ada dinasti politik yang busuk itu ya, namun tipu-menipu, curi-mencuri, korupsi itu tak ada hubungannya dengan kekerabatan,” katanya. (sc/nt) Foto: Jaka Nugraha/parle/od

Pemda Kurang Pahami Fungsi BLK

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena menyayangkan sikap pemerintah daerah (pemda) yang belum memahami fungsi strategis dari keberadaan balai latihan kerja (BLK). Akibatnya banyak fasilitas tersebut terbengkalai dan kurang terawat.

“Padahal, BLK merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya saat memimpin kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/7).

Menurutnya, jumlah lapangan kerja di negeri ini cukup besar, namun karena kompetensi yang dibutuhkan pasar tidak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, maka terkesan cukup banyak pengangguran.

Ia mengatakan, di sinilah peran penting BLK yang tidak hanya meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, namun juga bisa menghasilkan calon wiraswasta yang justru mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurutnya, harus ada revitalisasi dan reformasi terhadap seluruh BLK di seluruh UPTP dan UPTD BLK di Indonesia. Agar kendala yang dihadapi dalam pengembangan BLK semakin baik. Selama ini permasalahan yang sering dihadapi BLK diantaranya penyerapan anggaran belum maksimal, jumlah peserta yang semakin menurun, dan penyaluran tenaga kerja yang belum jelas.

Ia mencontohkan, terdapat BLK dengan peralatan yang sudah cukup memadai, namun jumlah peserta pelatihan masih sangat minim. Hal tersebut terjadi akibat tingginya biaya pelatihan yang harus disediakan, seperti honor instruktur serta kurikulum yang harus disiapkan.

Untuk mengatasi keterbatasan dana, lanjut dia, BLK serta pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan inovasi dan kreativitasnya. “BLK dapat diubah menjadi suatu badan layanan umum (BLU) dan dikerjasamakan dengan industri yang membutuhkan sumber daya manusia,” katanya. (andri)

Foto: Andri/parle/od



Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Balai Latihan Kerja Industri Semarang

Perlu Langkah Konkret Atasi Menggilanya Harga Daging

Seperti diprediksi sebelumnya, menjelang lebaran harga daging sapi di pasaran terus naik. Seperti di Aceh, harga daging sapi sudah mencapai Rp.150.000/kg, di Medan Rp120.000/kg, dan di Banten harga daging juga naik menjadi Rp125.000/kg. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan kepada Pers di Jakarta Jum'at (10/7).

Menurut Heri, harga daging di pasar Cicaheum Bandung juga naik yakni daging sapi menjadi Rp120.000/kg, di Surabaya Rp100.000/kg, Kalimantan Tengah Rp110.000/kg dan di Makasar



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

masih tetap sekitar Rp90.000/kg. Kenaikan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah jangan diam saja melihat pergerakan harga daging yang sudah menggila itu. Harus ada langkah kongkrit yang solutif. Karena daging sapi termasuk barang kebutuhan pokok yang harus tersedia sebagaimana dalam amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perpes tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,” tegasnya.

Diingatkan, jika pemerintah sampai

lengah, dikhawatirkan harga daging sapi akan jadi lebih “gila-gilaan lagi” karena permintaan terus naik. Sebagaimana prediksi yang ada, puncak kenaikan harga akan terjadi di Minggu terakhir menjelang lebaran.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga daging sapi tersebut, Heri meminta Pemerintah (Cq. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan

Instansi terkait lainnya) untuk melakukan langkah-langkah pengendalian, antara lain Kementerian Perdagangan harus memastikan ketersediaan stok dan logistik daging dalam posisi aman.

Tingkat keamanan stok ini sangat penting untuk menjaga kegiatan perdagangan nasional. “Jangan sampai gangguan pasokan daging sapi berdampak pada terganggunya kegiatan

perdagangan,” ujarnya dengan menambahkan, Tidak boleh ada Menteri yang jalan sendiri-sendiri. Cari solusi sama-sama, jangan ada ‘ego sektoral’. Jadikan kepentingan rakyat yang sedang susah karena naiknya harga daging sebagaimana tujuannya. (spy,mp).

Foto: Naefuroji/parle/od

Komisi IV Dorong Peningkatan Kinerja Bulog Divre Jatim



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam didampingi Anggota Komisi IV saat mengunjungi Bulog Divre Jatim

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Bulog yang pada tahun 2015 ini bisa mengendalikan harga-harga khususnya menjelang lebaran, walaupun ada tekanan tetapi tetap tidak terlalu fluktuatif. Bulog diharapkan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjaga stabilitas bahan-bahan pokok, dengan Pemerintah selalu hadir ditengah masyarakat ketika bahan-bahan pokok melonjak harganya.

Apalagi sekarang Bulog terjun pada bisnis bawang merah, telur, cabe, gula, dan minyak goreng. Menurut Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam, seandainya pada tahun-tahun sebelumnya telah mengambil bisnis seperti ini pasti harga-harga tidak fluktuatif.

“Alhamdulillah laporan dari stok Jawa Timur cukup sampai 7 bulan. Hal ini berarti tidak perlu impor, semoga secara nasional stok juga cukup. Saya mengapresiasi langkah Bulog untuk menjaga stok dan kementerian Pertanian untuk menjaga produksi,” kata Ibnu Multazam, dalam Kunjungan Kerja Kamis (9/7), saat mengunjungi Bulog Divre Jawa Timur untuk memastikan stok beras.

Ibnu, mengatakan stok penting dikuasai negara. Oleh karena itu, Komisi IV meminta untuk memulainya dengan lebih memaksimalkan menyerap gabah. Bulog dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat menginvestasikannya kepada pembangunan Unit

Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) dan memperbaharui gudang-gudang.

“Subdivre Bulog mempunyai gudang gabah yang lengkap dengan pengering dan lantai penjemur, karena menyimpan gabah lebih aman ketimbang menyimpan beras karena usia gabah jauh lebih lama dibandingkan dengan beras,” tandasnya.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Made Urip menegaskan Bulog yang diberikan tugas oleh Pemerintah untuk menyiapkan raskin dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), harus menyiapkanantisipasi jika terjadi cuaca iklim el nino.

“Perkiraan cuaca akan terjadi iklim el nino yang berarti musim kering akan dihadapi para petani. Padahal kita dituntut untuk menyiapkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), paling tidak 1,2 juta ton harus tersedia,” paparnya.

Terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, Bulog harus melakukan pembelian besar-besaran kepada petani, namun tidak bisa dilakukan secara rutin seluruhnya dari produksi nasional, sebab Bulog hanya mampu membeli 5-7% dari produksi nasional.

Made Urip mengkritik jika ada petugas Bulog yang tidak menjemput bola dari para petani. Target penyerapan Bulog hasil petani sebesar 4 juta ton dan Jawa Timur ditargetkan 500 ribu ton gabah. Dia mendorong Bulog yang salah satu tugasnya sebagai penyangga nasional maskimal dapat menyerap gabah petani Jawa Timur. “Komisi IV meminta satgas Bulog membeli gabah petani, dan berintegritas dengan baik,” tegasnya. (as) Foto: Agung/parle/od

Implementasi BOPTN Belum Berkeadilan

Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menemukan masih adanya persoalan implementasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Politisi yang juga Anggota Panja BOPTN ini melihat masih adanya ketidakadilan besaran BOPTN yang diberikan kepada PTN.

“Dalam penerapan BOPTN ini, kami melihat permasalahan di daerah itu belum adanya keadilan. Kenapa belum berkeadilan? Karena PTN yang sudah mapan dan besar, justru BOPTN-nya terus menerus ditambah,” tegas Sutan, saat RDPU dengan beberapa rektor universitas negeri, di Ruang Rapat Komisi X, baru-baru ini.

Politisi F-Gerindra ini menilai, kurang tepatnya indikator dalam menentukan besaran BOPTN antara PTN yang berskala besar dan kecil. Pasalnya, besaran BOPTN ditentukan salah satunya oleh kerjasama dengan industri dan hasil penelitian. Padahal, belum tentu setiap daerah terdapat industri.

“Misalnya di Pulau Jawa, PTN bisa bekerjasama dengan BUMN ataupun industri. Kalau di daerah luar Jawa, kan tidak banyak industri yang bisa diajak kerjasama. Oleh karena itu, ini harus dibuat mekanisme baru, dimana yang perlu dilihat dari PTN itu adalah jumlah mahasiswanya atau program studinya,” imbuh Politisi yang akrab dipanggil SAH ini.

Sutan menambahkan, adanya pema-

takan besaran BOPTN diambil dari hasil penelitian ataupun kerjasama dengan industri itu cukup merugikan PTN dan mahasiswa. Pasalnya, PTN yang baru dan berada di daerah, belum tentu ada industri di daerah tersebut. Sehingga tidak dapat melakukan kerjasama, PTN tidak mendapat *credit point*, yang berimbas kepada biaya operasional yang menjadi mahal.

“Setelah kami melakukan evaluasi terhadap implementasi BOPTN ini, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan kami. Inilah yang harus kita sempurnakan dan salah satu tujuan Panja adalah untuk bisa mengakomodir kepentingan universitas, apalagi menyangkut penelitian dan kerjasama dengan industri,” tambah Politisi asal Dapil Jambi ini.

Sementara Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengakui, memang masih ada perbedaan besaran BOPTN yang diterima PTN berskala besar dengan yang kecil. Hal itu ditentukan oleh ketercapaian standar nasional, indeks kemahalan, dan mutu PTN.

“Misal, PTN yang besar seperti Universitas Indonesia, Jurusan Teknik Mesin biaya prodinya katakanlah Rp 11 juta. Kenapa Teknik Mesin UI itu mahal, karena secara kualitas sangat baik, lulusannya juga sangat bagus. Ini yang membedakan teknik industri di daerah, misal Universitas Bengkulu, yang biaya prodinya misal 2 juta. Itu



Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra

yang menentukan indeks kemahalan,” jelas Politisi F-PPP ini.

Namun Reni memastikan, bukan berarti universitas baru dan skala kecil mendapatkan BOPTN kecil. Karena ada pengecualian tersendiri untuk PTN yang baru dinegerikan, yakni adanya BOPTN untuk pengembangan.

“Dan PTN yang masih kecil, kita dorong untuk semakin besar. Jadi, adil itu tidak mesti sama rata,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat ini.

Sebelumnya, Direktur Politeknik Negeri Malang, Tundung Subali Patma mengatakan, sebetulnya tidak permasalahan implementasi BOPTN. Ia juga mengklaim, mekanisme BOPTN yang dilaksanakan di PTN-nya sudah *on the track*.

“Memang ada usulan, perlu penyesuaian dasar dalam menentukan besaran BOPTN. Menurut kami yang paling tepat itu adalah jumlah mahasiswa, bukan kerjasama penelitian dengan industri. Itu lebih fair,” nilai Tundung.

(sf) Foto: Naefuroji/parle/od



Ketua PIA Deisti A Novanto didampingi anggota PIA meninjau pengungsi erupsi gunung Sinabung

PIA Berbagi Kebahagiaan Bersama Masyarakat Sinabung

Hampir dua tahun lamanya Gunung Sinabung bererupsi. Bahkan hingga kini, awan panas masih menyembur ke arah Tenggara dan Timur. Tak berlebihan jika Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih menyandang status awas pada Gunung yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Kondisi tersebut tak menyurutkan langkah PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI untuk berkunjung dan bertemu langsung masyarakat yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung. Baru-baru ini.

PIA yang diketuai Deisti A Novanto mengunjungi beberapa lokasi pengungsian, yakni di Desa Sempajaya, Kecamatan Brastagi, dan Desa Tongkoh. Disini Deisti dan beberapa anggota PIA lainnya seperti Lia Bambang Haryo, Lina Tambubolon, Yayuk Dossy Iskandar, Wida Retno Jhonny, Rina Syamsudin Siregar, dan Iles Ferdiansyah serta beberapa sahabat, menghibur sekitar 1.500 penduduk yang mendiami lokasi pengungsi di desa tersebut, lewat berbagai nyanyian.

“Kedatangan PIA ke lokasi ini (tempat pengungsian-red) semata untuk bertemu langsung dengan seluruh masyarakat di Desa Sempajaya. Kami tahu tinggal di pengungsian dengan berbagai peralatan yang alakadarnya tentu tidak mengenakan, namun bencana itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT.

Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi beban dan penderitaan saudara-saudara disini, kami datang menghibur sekaligus membawa sedikit “buah tangan” dari Per Saudaraan Isteri Anggota DPR RI,” papar Deisti.

Deisti menambahkan, pada kesempatan itu PIA memba-

wa “buah tangan” berupa berbagai kebutuhan sehari-hari seperti selimut, baju, sabun, air bersih, makanan, mukena, sajadah, mengingat desa tersebut sekitar enam puluh persennya merupakan muslim.

Memasuki waktu sekolah, tak lupa PIA juga membawa berbagai peralatan sekolah untuk anak-anak seperti tas, buku, pensil, dan pulpen. Tak hanya itu, PIA juga menyalurkan sumbangan dari seluruh anggotanya kepada masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung dalam bentuk uang tunai.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan berita menggembirakan, bahwa PIA juga tengah mendirikan dua buah PAUD (pendidikan anak usia dini) untuk anak-anak korban erupsi Gunung Sinabung. Kami berharap agar meski dalam kondisi memprihatinkan namun anak-anak sebagai generasi penerus harus tetap belajar, dan menuntut ilmu demi masa depan,” harap Deisti. (Ayu)/foto:rahayu/parle/iv.

Kondisi Kebun Binatang Surabaya Memprihatinkan

Komisi IV DPR RI prihatin melihat kondisi Kebun Binatang Surabaya. Berdasarkan informasi yang didapat ada kekisruhan kepengurusan kebun Binatang Surabaya, yang menyebabkan tidak terpeliharanya dengan baik lahan dan satwa yang ada.

“Saya prihatin banyak satwa yang mati secara tidak wajar di Kebun Binatang ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam saat memimpin kunjungan kerja ke Jawa Timur baru-baru ini.

Ibnu Multazam mengatakan, sebenarnya yang bertanggung jawab dalam memberikan izin pengelolaan kebun binatang adalah Kementerian Kehutanan. Oleh karena, itu Kementerian Kehutanan dapat mengevaluasi pengelolaan kebun binatang. “Kebun Binatang harus memiliki kelayakan dan kecukupan lahan, dokter hewan, pawang, dan pakan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja, kebun binatang bukan hanya sebagai tempat fasilitas pendidikan dan pariwisata, namun juga harus bertujuan melindungi dan meningkatkan populasi dari satwa tersebut. “Bukan hanya untuk komersial, kebun binatang harus melindungi dan menambah populasi satwa yang ada,” tandas sjachrani.

Dukung Impor Bibit Sapi

Pada kesempatan yang sama, Ibnu



Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau kebun binatang Surabaya

Multazam mengatakan mendukung rencana Pemerintah yang akan mengimpor sapi betina produktif dari Selandia Baru, untuk menambah populasi sapi dalam negeri.

“Saya mendukung program penambahan sapi indukan produktif yang akan dibagikan sebagai Bansos (Bantuan Sosial) kepada rakyat, namun sapi-sapi tersebut harus diadaptasi dengan iklim di Indonesia yang berbeda iklim dengan Selandia Baru termasuk pakannya,” kata Ibnu.

Selain itu, Ibnu juga meminta kepada

Badan Karantina Hewan Kementerian Pertanian untuk memastikan kemampuan reproduksi sapi-sapi tersebut. “Badan Karantina harus memastikan kesehatan dan kemampuan reproduksi sapi betina produktif impor dapat lebih dari lima kali melahirkan,” katanya.

Melalui cara ini, diharapkan tujuan dari program impor sapi betina produktif untuk menambah jumlah populasi sapi dalam negeri dapat tercapai. (as) foto: agung/parle/od

Komisi IV Akomodir Keinginan Masyarakat Mojokerto

Anggota Komisi IV DPR RI Eko Hendro Purnomo (F-PAN) mengaspresiasi kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

“Kita (Komisi IV) mengakomodir keinginan mereka, dengan berdialog bagaimana melihat perkembangan irigasi dan juga pertanian disana. Dan alhamdulillah, Kementerian Pertanian cukup bagus koordinasinya dengan Pemda Kabupaten Mojokerto,” katanya di sela kunjungan kerja ke Mojokerto baru-baru ini.

Anggota Dewan yang akrab dipanggil Eko Patrio ini mengatakan, tinggal penambahan-penambahan kaitannya dengan irigasinya yang hanya 145 meter, termasuk swadaya dari masyarakat. Dia berharap irigasinya lebih panjang lagi, dan itu akan diprioritaskan untuk ada penambahan, dan juga bansos baik yang berkaitan dengan jagung maupun padi.

Tim Kunker Komisi IV selama di Mojokerto juga mengunjungi Politeknik Kelautan dan Perikanan. Melihat proses penangkapan ikan, dan peningkatan nilai tambah sehingga berdaya saing dengan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dia mengungkapkan baru mengetahui ikan bandeng ada 164 duri, dan diinformasikan pencabutan duri dan sebagainya. “Karena dengan tidak adanya duri pengolahan ikan tadi bisa dibuat hal-hal yang lain, misalnya bandeng asap. ‘Cutari’ Cukil Tanpa duri,” katanya dengan canda khasnya.

Politisi asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII ini (Mojoker-

to, Jombang, Nganjuk, dan Madiun) mengatakan, semakin lama semakin hebatnya Indonesia dengan beribu-ribu jenis ikan dan sangat membanggakan. Termasuk juga di Balai Karantina yang merupakan Puspa Agro satu-satunya di Indonesia.

“Balai Karantina juga bisa mengkarantina produk-produk baik untuk ekspor maupun impor, yang tidak merugikan negara lain dan tidak merugikan Indonesia,” jelasnya. Hal-hal tersebut, kata Eko juga untuk meningkatkan daya saing, dan juga berkaitan dengan sertifikasi sehingga ada jaminan terkait keamanan higienis, tidak terkontaminasi penyakit bakteri.

Pengalaman yang baru dan menarik untuk Eko yang baru satu minggu di Komisi IV dikatakannya, bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan juga berkaitan dengan program yang sedang digenjut oleh Presiden Joko Widodo mengenai

Kemaritiman.

Para Taruna yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan diharapkan Eko bisa menjadi garda terdepan di bidang kemaritiman. Oleh karena itu, Komisi IV mendukung keberadaan Politeknik ini dan baru ada tiga di Indonesia yang konsen mempelajari dan melatih bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan.

“Kita dukung terus Politeknik ini ditumbuhkembangkan di tiap-tiap daerah, bagi yang sudah ada diberikan perlengkapan baik sarana dan prasarannya,” tegasnya. (as) foto: [naefuroji/parle/od](#)



Anggota Komisi IV DPR
Eko Hendro Purnomo

Firman Subagyo: Usul Perubahan UU KPK Bukan Dari DPR

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagyo mengatakan usulan perubahan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bukan berasal dari DPR RI. Sebab Badan Legislasi (Baleg) DPR tidak pernah menerima usulan dari Komisi III DPR maupun anggota DPR RI terkait usulan perubahan UU KPK tersebut.

Hal tersebut dikatakan Firman Subagyo pada Forum Legislasi bertajuk “Revisi UU KPK” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Selain Firman Subagyo, pembicara lain dalam diskusi ini adalah Ahli Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih dan Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua.

Firman menjelaskan, rapat kerja Badan Legislasi DPR pada 16 Juni 2015 hanya menyetujui RUU tentang Tambahan Bea Mineral. Namun, Menkumham Yasonna Laoly bersikeras untuk memasukkan revisi UU KPK.

Menkumham, menurut Firman, mengusulkan perubahan UU KPK dengan alasan bahwa pelaksanaan UU ini masih menimbulkan masalah sehingga menyebabkan terganggunya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menkumham juga berpandangan bahwa dalam upaya membangun negara yang makin bersih sekaligus mendorong penguatan seluruh lembaga terkait penyelesaian kasus korupsi seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK, maka perlu untuk melakukan peninjauan terhadap beberapa ketentuan.

Beberapa ketentuan tersebut, menurut Firman Subagyo, kewenangan terkait penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Kewenangan penuntutan juga perlu disinergikan dengan kewenangan kejaksaan. Selain itu, perlu membentuk Dewan Pengawas, dan lain-lainnya.

“Sejak awal DPR mendorong agar dituntaskan terlebih dahulu revisi UU KUHP dan revisi UU KUHP. Jadi, DPR menunggu sikap pemerintah,” kata politisi Partai Golkar ini.

Ditanya mengenai sikap Presiden Jokowi yang menolak revisi UU KPK, Firman Subagyo menyatakan dirinya belum mengetahui apakah ada surat resmi dari Presiden Jokowi soal pencabutan usulan revisi UU KPK tersebut. Pasalnya, Menkumham sebelumnya



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo dalam acara Forum Legislasi

sudah mengirimkan draf revisi UU KPK kepada DPR RI dan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 jangka menengah, dan bukan prioritas 2015.

“Kalau benar ada surat pencabutan (Usulan Revisi UU KPK, red), berarti tidak ada koordinasi antara Menkumham dengan Presiden,” kata Firman.

Menurut Firman, Baleg DPR belum menerima surat resmi dari Presiden Jokowi terkait usulan untuk mencabut revisi UU KPK.

Meski ada usulan pencabutan, lanjut Firman, tak bisa dilakukan secara serta-merta, karena ada mekanisme yang harus dilakukan. Apalagi, Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya sudah mengirimkan draf revisi dan menyetujui rencana perubahan itu dalam rangka mendukung pemerintahan Jokowi.

Firman mengungkapkan, penempatan RUU tentang Perubahan UU No.30 tahun 2002 tentang KPK berada pada urutan 63 dalam Prolegnas 2015-2019. Hal itu dikarenakan bahwa substansi/materi RUU ini sangat terkait dengan RUU tentang KUHP dan UU KUHAP. Dengan demikian, perubahan terhadap UU tentang KPK ini sebaiknya menunggu penyelesaian pembahasan RUU tentang KUHP yang sudah masuk Prolegnas RUU Prioritas tahun 2015.

Sementara itu, Yenti Garnasih mengatakan belum waktunya untuk merevisi UU KPK. Revisi UU KPK harus menunggu penyelesaian perubahan KUHP dan KUHAP.

“Apalagi ketentuan penyadapan itu merupakan tindak pidana yang luar biasa, *extra ordinary crime*. Bagaimana pun korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang dan pemberantasan itu

akan sukses kalau ada semangat yang sama antara DPR RI dengan pemerintah dan MK,” kata Yenti Garnasih.

Yenti menjelaskan, penyadapan itu kewenangan khusus, sehingga tidak perlu alergi dengan penyadapan. Sebab, lembaga lain seperti Badan Narkotika, Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lainnya juga mempunyai kewenangan penyadapan.

Justru, lanjut Yenti, dengan kewenangan penyadapan itu maka KPK akan lebih hati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

“Sesuai dengan KUHAP, penyadapan itu tidak masalah sepanjang untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

Sementara itu, Abdullah Hehama-hua menilai bahwa korupsi itu terjadi di mana-mana dan pembuktiannya sangat sulit tapi dampaknya luar biasa. Oleh karena itu, KPK harus diperkuat agar Indonesia dapat menjadi negara sebagaimana dicita-citakan.

Karena itu, lanjut Abdullah, apabila KPK tanpa kewenangan untuk melakukan penyadapan maka KPK akan makin lemah.

Jika ada kekhawatiran mengenai potensi terjadi pelanggaran HAM dan menyalahgunakan kewenangan, Abdullah menegaskan, bahwa di KPK hal itu mempunyai prosedurnya atau standar operasionalnya.

“Harus izin ke atasannya; deputi dan lain-lain. Hasilnya yang ditranskrip pun hanya yang terkait dengan korupsi, bukan pribadi, dan yang membaca hasil transkrip pun atas perintah jabatan,” tegas Adullah.

Ia menambahkan, “Tidak semua orang bisa baca. Jadi, yang protes KPK selama ini pasti ada masalah dengan korupsi”. (nt/sc) foto: jaka/parle/jod

Daerah Harus Siap Hadapi El Nino

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV menanyakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi El Nino yang tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang. Sejumlah wilayah penting yang merupakan lumbung pangan nasional termasuk Jabar perlu mendapat perhatian khusus agar bersiap menghadapi musim kering

yang ekstrim.

“Pak Gubernur, saya ingin menanyakan menghadapi El Nino seperti apa konsep provinsi, ini realitas yang harus kita hadapi. Pemerintah telah mendeklarasikan pembangunan 1000 embung termasuk di daerah endemik kekeringan, apa rencana ini bisa disinergikan terutama terkait ketersediaan



Pimpinan Komisi IV DPR bersama Gubernur Jabar Achmad Heryawan

tanahnya?" kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron saat rapat dengan Gubernur Jabar beserta jajaran di Bandung, Kamis (9/7/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menanyakan perkembangan penyelesaian Waduk Jatigede yang diharapkan dapat menjadi andalan irigasi lahan pertanian. Ia juga memberikan catatan tentang pesatnya pembangunan jalan tol dan rel keretaapi ganda yang membelah sejumlah lahan pertanian.

"Pembangunan rel keretaapi ganda, jalan tol banyak mengakibatkan lahan sawah terpotong. Rata-rata kita mengandalkan sistem irigasi grafitasi, dialirkan dari sawah ke sawah kalau kemudian di tengah sawah ada pembangunan rel kereta api ganda atau pembangun tol ini akan mengham-

bat pengairan dan mempengaruhi produksi," tekan dia.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Tim Kunker dari FPG Ichsan Firdaus mempertanyakan tentang tumpang tindih kebijakan Pemprov, Pemkab/kota sehingga alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terkendali. "Mungkin provinsi punya kebijakan melindungi lahan tapi kab/kota tidak karena ingin mengembangkan wilayahnya, nah ini bagaimana solusinya?" ujarnya.

Ia juga mengingatkan untuk menghadapi musim kering yang berdampak gagalnya lahan pertanian, UU no.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengamanatkan asuransi bagi petani. Pemprov Jabar menurutnya perlu bersiap terhadap program ini karena anggaran perlindungan sebesar Rp150 miliar telah disetujui DPR.

Kunker yang dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo ini juga meminta penjelasan Gubernur Jabar terkait perkembangan penggunaan anggaran tahun 2015 dan persiapan RAPBN 2016. "Kami ingin mendengar penjelasan secara utuh terkait mitra kerja kita," tutur Edhy.

Sementara itu Gubernur Jabar Achmad Heryawan menjelaskan sejumlah pihak perlu duduk bersama untuk menghadapi El Nino panjang tahun ini. Sejauh ini menurutnya cara yang digunakan untuk mencukupi pengairan di lahan pertanian adalah memberdayakan sumur pantek dan pompa.

"Dalam jangka panjang harus kita selesaikan dengan menjaga keseimbangan alam dimana hutan kita perbaiki dengan seksama. Hidrologi air normalnya, hujan harus diendapkan di tanah, embung, danau setidaknya 20 persen. Nah kalau terjadi kekeringan berarti air yang berhasil disimpan, diikat hutan kurang dari 20 persen," katanya.

Ia juga memaparkan proses penggenangan Waduk Jatigede sudah semakin dekat. Proses pembayaran lahan warga dengan total anggaran Rp741 milyar sudah berjalan. Heryawan juga memaparkan pembangunan di wilayah Jabar terus ditingkatkan, anggaran menurutnya tersebar 50 persen di wilayah selatan, 25 persen di tengah dan 25 persen di utara. (iky) foto: ibnur/parle/hr

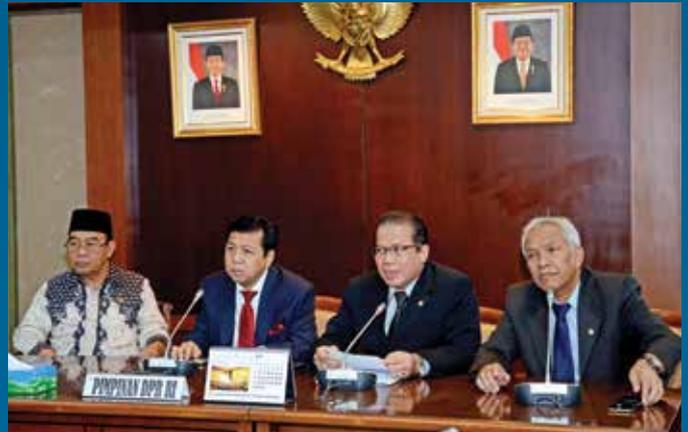
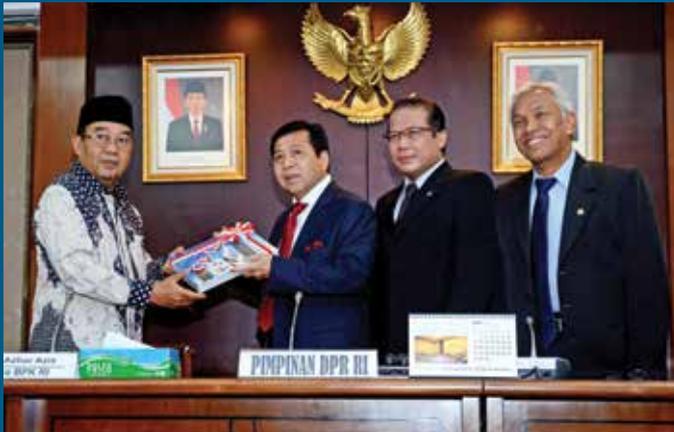


Pimpinan, Anggota dan Keluarga Besar
Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan

Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1436 H
Mohon Maaf Lahir dan Batin



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Bersama Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), saat acara buka bersama dengan buruh, di Kampung Pulo Kapuk, Dusun III, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/07/15). Foto: Naefuroji/Parle/OD



Pimpinan DPR RI Setya Novanto, Agus Hemanto, dan Taufik Kurniawan menerima laporan audit anggaran kesiapan pilkada serentak dari Pimpinan BPK, Senin (13/7) Foto : Jaka/Parle/OD



Acara Buka Bersama Komisi VII DPR RI Bersama Mitra Kerja Di Aula Masjid Baiturrahman Gedung DPR Senayan, Rabu (8/7). Foto: Naefuroji/Parle/OD